



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PAINAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan	1
	1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	2
	1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
	1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
	2.1 Ekonomi Makro	5
	2.2 Kebijakan Keuangan	5
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	7
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
	3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	13
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	
	4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	18
	4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	19
	4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	21
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
	5.1 Laporan Relaisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	23
	5.2 Neraca	25
	5.3 Laporan Operasional	30
	5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	32
BAB VI	PENUTUP	

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah **Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan** per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana Posisi Keuangan Tahun 2025 adalah sbb :

Anggaran	Rp	380.213.705.216
Jumlah Realisasi	Rp.	360.568.299.290,50
Sisa UYHD	Rp	28.154.319
Contra Post	Rp.	1.142.147.910
Saldo	Rp.	19,645.405.925,50

Painan, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


AGUSTINA RAHMADANI S.ST MM
NIP. 19790810 200312 2 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kesehatan, perlu adanya fasilitas serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang kesehatan.

Pengelolaan bidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 162 Tahun 2021, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kesehatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan
- d. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2024, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca

merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Kesehatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Dinas Kesehatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA/DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trce back) pos-pos laporan keuangan.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Tanggal 30 Desember 2025
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dearah;
13. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Peraturan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Tanggal 30 Desember 2025
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan .

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Relaisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, serta sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Memuat informasi tentang Ekonomi Makro (Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Perekonomian Daerah, Pendapatan Perkapita, Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia) Kebijakan keuangan dan Target APBD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat informasi tentang Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada sdalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasar penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan, yang meliputi : Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Beban dan Komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB VI PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dibidang Kesehatan diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta kualitas hidup sehat, peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kesehatan.

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan dengan beberapa sasaran yang mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1 Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kasda
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga, dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar)

- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

2.2.2 Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah (Kasda) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kasda.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
- Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

2.2.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Kebijakan Keuangan yang diambil yaitu kebijakan aspek belanja, dimana kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik dan belanja tidak langsung melalui efisiensi dengan tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing Program dan Kegiatan Seperti :

- Peningkatan Efisiensi dan efektifitas belanja langsung pengelolaan anggaran SKPD
- Peningkatan Efisiensi dan Effektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama pada program dan kegiatan yang berdampak besar untuk keperluan masyarakat
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	144.913.919.247
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.177.110
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.647896
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	323.493.428
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semester SKPD	79.144.654
Pengamanan barang Milik daerah SKPD	96.017.000
Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	36.727.000
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	54.700.518
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	77.548.000
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	74.748.950
Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan bangunan Kantor	13.028.067
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.204.310

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.001.067
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.505.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.856.500
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	42.492.562
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.464.050
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	262.489.936
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.699.874
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, kendraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas Jabatan	39.190.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendraan Dinas Operasional atau lapangan Pemeliharaan peralatan dan mesin	235.293.415
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	142.060.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	230.210.800
Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas pelayanan Publik dan tata laksana	30.887.030
Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	5.766.817.512
Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan /alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	809.419.940
Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan /alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.837.914.926
Pengadaan alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	305.022.200
Pengadaan Obat bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan	11.659.138.048
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	34.786.700
Distribusi alat kesehatan, obat bahan habis pakai Bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas Kesehatan	102.924.732
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.584.640
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	213.198.540
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	18.559.885

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	49.007.100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.797.750
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	123.473.300
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	51.529.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes meletus	58.837300
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	31.351.300
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	55,135.940
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Resiko HIV	40.566.290
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penduduk terdmpak krisis kesehatan akibat Bencana	66.136.050
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	167.079.700
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	89.141.802
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	194.100.498
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	266.880.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akufuntur Asuhan mandiri dan Tradisional lainnya	54.200.200
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	205.267.500
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	370.342.000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.842.895.857
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit potensi KLB ke laboratorium Rujukan /Nasional	117.375.000
Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	216.621.118
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	492.129.635
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten /Kota	75.777.484

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	33.058.990
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan malaria	19.818.740
Pegelolaan Kawasan Tanpa Rokok	68.184.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	20.182.500
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan anak	242.548.700
Pengelolaan Layanan Imunisasi	38.764.250
Pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan	71.918.352
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	80.362.646
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kesehatan Rujukan	70.484.200
Pengendalian Perizinan Praktek tenaga Kesehatan	42.518.400
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta Tindak lanjut Perizinan Praktek tenaga kesehatan	63.417.620
Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber Daya manusia Kesehatan	17.430.000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	173,314,250
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	44.584.050
Mengembangkan Mutu dan peningkatan Kompetensi teknis Sumber Daya manuaasi Kesehatan TK Daerah Kabupaten /Kota	967.618.440
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	44.413,000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	31.500.200
Pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa Bogo.Rumah makan /restoran dan Depot Air Minum (DAM)	9.585.000
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan ,Advokasi ,Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24.621.750
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	26.614.600
Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat Kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerangkan perilaku Hidup dan Bersih	18.629.550

Bimbingan teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Nara Sumber Daya Masyarakat (UKBM)	83.054.900
RSUD Tapan	26.325.128.733
Puskesmas Br Br Belantai	1.660.892.096
Puskesmas Air Pura	1.865.502.717
Puskesmas Pasar Kuok	2.580.212.577
Puskesmas Surantih	3.993.644.098
Puskesmas Kambang	3.756.643.013
Puskesmas Tanjung makmur	2.069.773.112
Puskesmas Air Haji	4.163.294.371
Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan	1.739.473.725
Puskesmas Asam Kumbang	1.465.500.236
Puskesmas Tarusan	1.070.954.380
Puskesmas Koto Baru	1.934.627.555
Puskesmas Pasar baru	2.581.997.398
Puskesmas Indrapura	2.641.583.611
Puskesmas Balai Selasa	3.567.429.354
Puskesmas Lumpo	1.609.151. 678
Puskesmas IV Kt Mudik	1.720.046.655
Puskesmas Salido	2.739.616.296
Puskesmas Tapan	2.164.089.674
Puskesmas Koto Berapak	2.550.976.101
Puskesmas Tanjung Beringin	2.371.034.543
Puskesmas Kayu Gadang	1.190.846.259
RSUD DR. Muhammad zein painan	94.209.957.781

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Retribusi Daerah

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 109.778.301.809

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan retribusi pelayanan kesehatan yang terdapat pada RSUD M Zein. RSUD Tapan dan Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan.

- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp. 105.000.000

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan retribusi penyewaan tanah dan bangunan.

2. Lain-lain PAD yang Sah

- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp. 2.243.695.676,-

Pendapatan Dana Kapitasi JKM pada FKTP merupakan pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD

B. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 2.243.695.676,-

Lain –lain pendapatan daerah yang sah disini merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Tabel.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Retribusi Daerah	108.801.908,088	109.778.301.809	100,90
Lain-lain PAD yang sah		2.243.695.676	190,78
Jumlah PAD	123.927.657.442	108.088.195.087	87,22

3.1.2 Belanja

Pelaksanaan Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD. Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA			
Belanja Operasi	380.213.705.216	360.568.299.290,50	94,83 %
- Belanja Pegawai	166.180.395.608	158.804.667.790	92,68 %
- Belanja Barang dan Jasa	172.978.971.042	163.609.865.880,50	94,58 %
- Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	100,00 %
Jumlah Belanja Operasi	295.588.315.066	274.886.614.604,16	93,00 %
Belanja Modal			
- Belanja Modal alat Besar	1.490.317.862	1.051.000.000	70%
- Belanja Modal alat Angkutan	950.000.000	949.993.500	100 %
- Belanja Modal Alat kantor Rumah tangga	2.209.435.000	2.275.270.000	99,17 %
- Belanja Modal alat studio,Komunikasi dan pemancar	22.810.500,-	22.500.000	98,64 %
- Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan	12.187.976.134	11.579.615.347	99,03
- Belanja Modal Laboratorium	696.329.250	602.078.374	86,46 %
- Belanja modal Komputer	1.106.488.350,-	993.569.875	89,79 %
- Belanja ModalbAlat	92.862.500,-	65.223.600	70,24 %

Eksplorasi			
- Belanja Modal alat Produk /Pengolahan dan Permurnian	500.000.000	498.700.000	99,74 %
-Belanja Modal alat Produksi,Pengolahan dan Pemurnian	2.515.603.527	1.320.757.000	52,50 %
- Belanja Modal Bangunan Gedung	17.876.909.433	17.816.255.924	99,66 %
- Belanja Modal gedung dan Bangunan Blud	134.330.000	134.330.000	100 %
- Belanja Modal Instalasi	576.491.000	494.794.000	85,83 %
-Belanja modal jalan,jaringan Modal,jalan,jaringan dan irigasi BLUD	410.000.000	149.678.000	36,51 %
Jumlah Belanja Modal	40.854.338.566,00	37.953.765.620,00	92,90 %
JUMLAH BELANJA	380.213.705.216,00	360.568.299.290,50	94,83 %
SURPLUS/ (DEFISIT)	(271.411.797.128,00)	(250.789.997.481,50	92,40 %

Total realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 360.568.299.290,50,- . Jumlah tersebut mencapai 94.83 % dari total anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 380.213.705.216 Pada Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp339.359.366.659 terealisasi sebesar Rp. 322.614.533.679,50 atau sebesar 95,07 % yang terdiri dari belanja pegawai APBD sebesar Rp. 158.804.667.790,- atau sebesar 95,56 % dan belanja pegawai BLUD sebesar Rp. 19.185.443.716,- atau sebesar 92.84 %. Sedangkan untuk Belanja Barang dan jasa dari total anggaran Rp. 172.978.971.042,- terealisasi sebesar Rp. 163.609.865.880,50 atau sebesar 94.58 % dan untuk Belanja Hibah dari total anggaran Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,- atau sebesar 100%.

terdapat defisit dari anggaran pendapatan dan belanja sebesar (Rp. 250.789.997.481,50,-) atau sebesar 92.40 % dari jumlah anggaran sebesar (Rp. 271.411.797.128 -).

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Rata rata kegiatan yang realisasinya di atas 75% ,

B A B IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak kan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.
- Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Kas dan setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing., dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank pada tanggal neraca.

2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

3. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

4. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnyayang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

5. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi angka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

6. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau baiaya pembebanan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya , pengurusan IMB, Notaris dan Pajak.

8. Peralatan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut digunakan.

9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai.

10. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap baru.

11. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang dan menjadi hak pemerintah tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah
2. Diterima oleh SKPD
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Pendapata-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di PPKD dan SKPD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporanyang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

B A B V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

No Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
5.5.1 PENDAPATAN	109.778.301.809	106.578.394.619
a. Retribusi Daerah		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	107.429.606.133	106.464.694.619
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		113.700.000
• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	105.000.000	
b. Lain-lain PAD yang Sah		
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.243.695.676	1.509.683.000
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
	0	

Jumlah realisasi pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp. 109.778.301.809,- merupakan lain-lain pendapatan yang sah atas Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

No Perkiraan	Realisasi 2025	Realisasi 2024
	360.568.299.290,50	312.699.177.294.16
5.5.2 BELANJA		
a. Belanja Operasi	322.614533.670.50	274.886.614.604,16
• Belanja Pegawai	158.804.667.790	114.668.244.254

Jumlah tersebut merupakan Realisasi pegawai dalam Tahun Anggaran 2025

Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terdiri dari atas :

Gaji dan Tunjangan ASN	127.217.526.836	85.408.393.966
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.421.697.238	8.876.937.565
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	579.505,926	2.323,412.232

Belanja Pegawai BLUD	19.185.443.716	18.059.500.491
• Belanja Barang dan Jasa	163.609.865.880,50	160.118.370.350,16
Belanja Barang Pakai Habis	14.976.558.719	14.910.871.034
Belanja Jasa Kantor	8.181.818.667	9.689.083.944
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.083.080.056	33.905.646.966
Belanja Sewa Gedung dan bangunan	5.250.000	1.300,000
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.703.254.891	1.253.064.706
Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	321.546.430	213.111.840
Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan	623.045.704	120.798.430
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan & Irigasi	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.383.408.214	11.356.708.498
Belanja Barang dan Jasa BLUD	86.475.749.792,50	90.084.171.159,16
• Belanja Hibah	200.000.000	100.000.000
No Perkiraan	Realisasi 2025	Realisasi 2024
	322.614.533.670,50	274.886.614.604.16

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.37.953.765.629,- dari total anggaran sebesar Rp. 40.854.338.566 atau sebesar 93 %.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.358.707.696 13.548.210,969

Merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2025 dan 2024. Untuk Tahun 2025 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mencapai 88,57 % dari jumlah yang dianggarkan Rp.21,856,608.133

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Alat Angkutan	949.993.500	6.782.100.000
2	Belanja Modal Alat Kantor & RT	2.275.270.000	805.081.000
3	Belanja Modal Alat Studio,	27.500.000	

	Komunikasi dan Pemancar		
4	Belanja Modal Alat Kedokteran & Kesehatan	11.523.866.347	3.349,545.052
5	Belanja Modal Alat Laboratorium	602.078.374	4.828,000
6	Belanja Modal Komputer	993.569.875	584.450.000
7	Belanja Modal Alat Eksplorasi	65.223.600	46.920.000
8	Belanja Modal alat Produksi ,Pengolahan dan pemurnian	498.709.000	636.600.000
9	Belanja Modal Peralatan & Mesin BLUD	1.320.757.000	1.338.677.917
	Total	19.358.707696	13.548.202.969

2. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.950.585.924 22.818.989.401**

Merupakan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 Untuk Tahun 2025 realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 17.950.585.924 atau sebesar 99.66 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.17.876.909.433

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Bangunan dan Gedung Kantor	418.000.000	
2	Belanja Modal Gedung Instalasi	1.621.264.000	985.500.000
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	15.776.991.924	21.833.489.401
4	Belanja Modal bangunan Fasilitas umum		179.567.000
2	Belanja Modal Gedung & Bangunan BLUD	134.330.000	
	Total	17.950.584.924	22.818.989.401

3. Belanja Modal Jalan , jaringan dan Irigasi 644.472,000 1.066.306.500

Merupakan Realisasi Belanja Modal jalan.Jaringa dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 untuk tahun 2025 realisasi belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 644,472.000 atau sebesar 65.32% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.986,491.

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih	455.500,000	87.933.500
2	Belanja Modal Instalasi air Buangan Domestik	39.294.000	
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan BLUD	149.678.900	
4	Belanja Modal Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)		978.763.000
5	Belanja Modal Audio Visual		11.000.000
6	Belanja Modal Aset Tetap lainnya BLUD		1,800.000
	Total	644.472.000	1.066.306.500

5.2. NERACA

Neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan per tanggal neraca meliputi aset, utang dan ekuitas dana. Neraca tersebut merupakan bagian Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2025 memiliki Total Aset sebesar Rp. 229.731.383.629,22 Total Kewajiban sebesar Rp. 4.494.218.473,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 213.526.944.121,93

Rincian atas masing-masing pos di Neraca per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
A. Aset		
1. Aset lancar	18.370.808.839,69	22.568.970.483,27

- Kas di Bendahara Penerima

Penerimaan Daerah yang dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pendapatan BLUD dan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan.

- Kas di Bendahara Pengeluaran

0 0

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 tidak ada, karena sisa UYHD sudah di setor ke Kas Daerah sebelum tanggal 31 Desember 2025

Pada tanggal 31 Desember 2025 juga tidak terdapat kas di bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Kas di BLUD

2.770.010.223,69 2.946.337.246,19

Kas di BLUD merupakan sisa pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang terdiri dari 20 Puskesmas yaitu :

NO	PUSKESMAS	Jumlah
1	Puskesmas Air Haji	473.472.690,00
2	Puskesmas Air Pura	113.900.634,00
3	Puskesmas Asam Kumbang	44.612.558,00
4	Puskesmas Balai Selasa	247.029.376,00
5	Puskesmas Barung Barung Belantai	57.723.510,00
6	Puskesmas Inderapura	169.526.407,00
7	Puskesmas Kambang	205.171.952,00
8	Puskesmas Koto Baru	57.655.842,50
9	Puskesmas Koto Berapak	65.826.858,00
10	Puskesmas IV Koto Mudik	41.550.147,00
11	Puskesmas Lumpo	67.785.961,00
12	Puskesmas Pasar Baru	72.405.928,00
13	Puskesmas Pasar Kuok	103,679.167,00
14	Puskesmas Ranah Ampek Hulu	142.759.427,00
15	Puskesmas Salido	185.540.963,00
16	Puskesmas Surantih	107.894.048,24
17	Puskesmas Tanjung Beringin	314.856.348,00
18	Puskesmas Tanjung Makmur	71.660.850,40
19	Puskesmas Tapan	101.067.616,00
20	Puskesmas Tarusan	125.889.940,55
	Total	2.770.010.223,69

• Kas Lainnya	0	0
• Piutang Pajak	0	0
• Piutang Retribusi	2.203.553,636	
• Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	0
• Piutang kepada Pihak Ketiga	0	0
• Piutang Lainnya	0	0
• Penyisihan Piutang	0	0
• Beban Dibayar Dimuka	0	0
• Persediaan	12.176.055.032	12.904.809.271

Terdapat Persediaan akhir Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Rp. 12.176.055.032,-

Rincian Persediaan tahun 2024 yaitu :

• ATK	8.831.750
-------	-----------

• Cetak	3.777.500
• Alat Listrik	
• Alat Kebersihan	10.246.106
• Materai dan Benda Pos	
• Pembelian Pengisian Oksigen	1.470.000
• Persediaan Makanan Pokok Pasien	1.002.750
• Obat JKN	455.188.601
• Obat IFK	1.519.822.505
• Obat Program	224.266.148
• BMHP JKN APBD	347.628.768
• Vaksin	892.266.281
• Bahan Laboratorium	350.895.922
• BMHP IFK	749.673.230
• BHP Program	534.378.707
• Obat Apotik	116.780.200
• BMHP Apotik	40.097.221
• Obat IFK Gudang Farmasi	2.006.380.328
• Obat Program Gudang Farmasi	1.382.520.409
• BMHP IFK Gudang Farmasi	997.064.360
• BMHP Program Gudang Farmasi	230.401.649
• Vaksin Gudang Farmasi	2.123.236.537

No Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
2. Aset Tetap	210.694.512.567	184.063.684.437,53
• Tanah	6.164.042.648,53	5.648.610.648,53

Tanah yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2025 bertambah sebesar Rp. 515.432.000 sehingga Total tanah pada tahun 2025 menjadi Rp. 6.164.042.648,53 . Penambahan tersebut dikarenakan adanya Pembelian Tanah untuk pembangunan Puskesmas

- Peralatan dan Mesin 115.036.693.327,- 104.047.654.957,-
Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 116.036.693.327 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 104.047.654.957,- sehingga terdapat penambahan aset pada peralatan dan mesin sebesar Rp. 11.027.492.045,- penambahan tersebut di dapat kan adanya Belanja Modal peralatan dan Mesin Tahun 2025
- Gedung dan Bangunan 175.050.307.321 160.282.687.721,00
Nilai aset Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp.175.050.307.321 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 160.282.687.721,-. terdapat penambahan nilai gedung bangunan sebesar Rp. 18.483.321.619
- Jalan, Irigasi dan Jaringan 31,715.609.742 27.840.470.085,-

Terdapat penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025
- Aset Tetap Lainnya 17 490.000 17.490.000
Tidak terdapat penambahan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025
- Akumulasi Penyusutan (118.693.788.583) (118.693.788.583)
Terdapat penambahan pada Akumulasi Penyusutan pada Tahun 2025

No Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
3. Aset Tetap Lainnya	88.400.000	88.400.000
Tidak terdapat penambahan pada Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025. Aset adapun rincian aset tetap lainnya adalah :		
• Aset Tidak Berwujud	97.208.250,-	97.208.250
• Aset Lain-lain	682.064.004,-	622.763.171,-

No Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
--------------	------------------------	------------------------

B. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Pada Tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat utang perhitungan pihak ketiga.
- Utang Bunga Denda dan Commitment Fee
Pada Tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat utang bunga denda dan Commitment Fee
- Pendapatan Diterima Dimuka
Pada Tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat pendapatan diterima dimuka
- Utang Beban
Pada Tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat utang beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 4.494.218.473
Pada Tahun 2025 terdapat Penambahan Hutang utang jangka pendek

No Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
C. Ekuitas	213.526.944.121,93	202.840.865.513,96

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Jumlah Aset dengan Jumlah Kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada posisi per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 213.526.944.121,93 sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 202.840.865.513,96

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasional dari kegiatan operasional dalam tahun 2025. Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut :

- **PENDAPATAN ASLI DAERAH**

No Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Daerah	109.778.301.809	108.088.077.619

Retribusi Daerah pada Tahun 2025 merupakan pendapatan dari retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp. 105.000.000 dan Pada Tahun 2024 rekeningnya di pemakaian kekayaan daerah yaitu sebesar Rp. 113.700.000

Lain-lain PAD yang Sah 2.243.695.676.

Pada Tahun 2025 Lain-lain PAD yang Sah terletak di Pendapatan Dana kapitasi JKN pada FKTP

- **BEBAN OPERASI**

Jumlah berikut merupakan beban pegawai dalam Tahun Anggaran 2025, jumlah realisasi beban pegawai tersebut dapat terinci sebagai berikut :

No Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai		
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	127.217.526.836	85.408.393.966
Beban Gaji Pokok ASN	97.583.770.886	64.912.848.344
Beban Tunjangan Keluarga ASN	63.117.708.630	5.992.515.846
Beban Tunjangan Jabatan ASN	466.250.000	488.445.000
Beban Tunjangan Fungsional ASN	6.467.482.233	6.431.283.000
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.117.602.610	377.255.816
Beban Tunjangan Beras ASN	5.472.109.515	3.526.998.840
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	219.097.881	164.498.819
Beban Pembulatan Gaji ASN	1.560.846	908.000
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	4.382.258.288	2.972.101.212
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	209.606.342	135.491.722
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	609.344.130	406.047.367

No Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.316.384.495	6.514.637.170
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi kerja ASN	6.528.306.817	1.825.182.110
- Beban Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi PNS	2.977.500.000	950.860.279
- Beban Honorarium		876.199.500

No Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Beban Barang dan Jasa		
Beban Barang Pakai Habis	14.876.558.719	14.910.871.034
Beban Jasa Kantor	9.448.253.502	8.181.818.667
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	35.083.080.056	33.905.646.966
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.250.000	1.300.000
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.703.254.891	1.253.064.706
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	321.546.430	213.111.840
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	623.045.704	120.798.430
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.383.408.214	11.355.608.498
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	67.548.500	37.479.050

No Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Beban Hibah		
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000	100.000.000,00

Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp.(250.789.997.481,50)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp (204.611.099.775,16)

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- Ekuitas Awal 202.840.865.513,96
Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan milik Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 213.526.944.121,93

- Surplus/Defisit-LO (250.789.997.481,50)
- Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (250.789.997.481,50)

- RK
RK sebesar Rp. 203.695.320.081

- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar
Terdiri dari :
Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap
Koreksi Ekuitas - Aset Lain-lain
Koreksi Ekuitas – Penyusutan
Koreksi Ekuitas - Piutang
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Dana Bergulir
Koreksi Ekuitas - Extra Comptable
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang
Koreksi Ekuitas - Utang
Koreksi Ekuitas - Amortisasi
Koreksi Ekuitas - Setara Kas Lainnya
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Penerimaan
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Pengeluaran
Koreksi Ekuitas - Lain-lain
- Ekuitas Akhir 213.526.944.121,93

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025

Untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan maka pada akhir tahun anggaran disusun Laporan Keuangan OPD yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebesar Rp360.568.299.290,50 atau 94,83 %. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas, ada beberapa belanja yang tidak tercapai target indikator kinerja .